



## BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP  
NOMOR : 481.16/ ~~00~~ /17/TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT UMUM DAN KHUSUS  
UNTUK SELURUH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta guna mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cilacap, perlu ditetapkan informasi yang dikecualikan bersifat umum dan khusus untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa pengklasifikasian informasi publik merupakan penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Bersifat Umum dan Khusus Untuk Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Informasi yang Dikecualikan Bersifat Umum dan Khusus untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Cilacap, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 15 JAN 2015

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Lampiran I  
 KEPUTUSAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR : 481.16 / 99 / 17 / TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 BERSIFAT UMUM DAN KHUSUS UNTUK SELURUH  
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI  
 KABUPATEN CILACAP

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT UMUM  
 PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6
1	Biodata elektronik PNS (database).	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
2	Dokumen / Berkas / Arsip PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
4	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
5	Daftar nilai DP-3 PNS	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6.	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
6	Data rekam medik pasien Poliklinik.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h.	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
7	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i.	sampai dengan pelantikan.	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.
8	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia.	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Melindungi kerahasiaan dokumen.

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6
9	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j  - Keppres Nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya.	selama proses pengadaan barang/jasa.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara perematur (informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar.
10	Dokumen penawaran kontrak	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j  - Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.	selama proses pengadaan barang/jasa.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian.
11	Lokasi Server	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37)	tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data.	Melindungi/mengamankan perangkat serta data.
12	Internet Protocol/IP Address Private.	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	tidak terbatas	Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses.	Menjaga/melindungi hak akses.
13	Bandwidth Management	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
14	Kode akses elektronik	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer.
15	Sistem Keamanan Elektronik	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer.
16	Sistem Managemen Database	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer.
17	Hasil : Pemeriksaan Kasus / Khusus	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang - Peraturan Mendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas	tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara perematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
18	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Eselon II kepada Gubernur Jawa Tengah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i.	tidak terbatas	Memungkinkan dapat menimbulkan gejala yang tidak diinginkan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6
19	Bahan Rapat BAPERJAKAT	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ( Pasal 17 huruf h )	Tidak terbatas	Memungkinkan dapat menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
20	Rancangan /SK jabatan struktural sampai dengan pelantikan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ( Pasal 17 huruf h )	Sampai dengan pelantikan	Memungkinkan dapat menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
21	Usul Mutasi/penempatan pegawai dari SKPD	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ( Pasal 17 huruf h )	Tidak terbatas	Dapat mempengaruhi rencana kebijakan kepegawaian	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif
22	Draft SK Mutasi/penempatan PNS	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat mempengaruhi rencana kebijakan kepegawaian	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif
23	Petikan SK Bupati tentang mutasi/penempatan PNS	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan penyerahan SK kepada yang bersangkutan	Memungkinkan dapat menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
24	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ( Pasal 17 huruf h )	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi pegawai
25	Hasil Evaluasi kinerja pegawai melalui SKP	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ( Pasal 17 huruf h )	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi yang bersifat rahasia
26	Data Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ( Pasal 17 huruf h )	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi yang bersifat rahasia
27	Data hasil General Check Up kesehatan PNS Pejabat struktural	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ( Pasal 17 huruf h )	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi yang bersifat rahasia
28	Data Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ( Pasal 17 huruf h )	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga kerahasiaan pribadi
29	Data Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ( Pasal 17 huruf h )	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga kerahasiaan pribadi
30	Bahan Rapat Baperjakat dan Notulennya	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ( Pasal 17 huruf h )	Tidak terbatas	Menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan materi secara prematur	Menjaga kerahasiaan pribadi
31	Data Wilayah rawan bencana	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada perubahan	Menginformasikan kepada publik agar dapat mengantisipasi dini	Menghambat informasi penting bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana
32	Data korban bencana	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada data baru	Mengungkap data pribadi korban bencana	Melindungi korban bencana dari kerumuman wartawan

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6
33	Data selter (tempat evakuasi bencana alam tsumnami)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada penambahan	Menginformasikan kepada publik agar dapat diketahui masyarakat secara luas	Menghambat informasi penting bagi masyarakat secara umum
34	Data rumah panggung (tempat evakuasi bencana alam banjir)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada penambahan	Menginformasikan kepada publik agar dapat diketahui masyarakat secara luas rumah-rumah panggung sebagai tempat evakuasi dini	Menghambat informasi penting bagi masyarakat secara umum
35	Data TEWS (Tsunami Early Warning System / Sirine Peringatan Dini	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada penambahan	Menginformasikan kepada publik agar masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana tsunami lebih waspada	Menghambat informasi penting bagi masyarakat secara umum
36	Data interkoneksi ( yang berada di tempat ibadan mesjid dan mushola)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada penambahan	Menginformasikan kepada publik agar penduduk di lingkungan rawan bencana tsunami lebih waspada dan berhati-hati	Menghambat informasi penting bagi masyarakat secara umum
37	Data peralatan kebencanaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada penambahan	Menginformasikan kepada publik peralatan-peralatan yang dapat digunakan saat terjadi bencana	Menghambat informasi kepada masyarakat secara umum peralatan-peralatan yang tersedia jika terjadi
38	Data logistik kebencanaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada penambahan	Menginformasikan kepada publik kesiapan logistik yang tersedia untuk didistribusikan kepada korban bencana	Menghambat informasi kepada masyarakat secara umum tentang kesiapan logistik BPDB Kab. Cilacap jika terjadi bencana

**BUPATI CILACAP**

ttd

**TATTO SUWARTO PAMUJI**

Lampiran II  
 KEPUTUSAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR : 481.16 / 99 / 17 / TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 BERSIFAT UMUM DAN KHUSUS UNTUK SELURUH  
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI  
 KABUPATEN CILACAP

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERSIFAT KHUSUS  
 PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

No	SUMBER INFORMASI	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS BINA MARGA DAN ESDM	Dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP)	UU Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan h. UU Nomor 4 th. 2009 pasal 88.	Tidak terbatas	Membuka rahasia perusahaan Menimbulkan persaingan tidak sehat.	Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) Menghindari persaingan tidak sehat
		Hasil Eksplorasi Detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan Kuantitas komoditas tambang)	UU Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan h.	Tidak terbatas	Mengungkapkan kekayaan Alam Indonesia Mmembuka rahasia perusahaan	Pengelolaan managemen potensi sumber daya alam - Hak Kepemilikan hasil Eksplorasi Detail
		Laporan Studi Kelayakan/PS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	- UU Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan h. - UU Nomor 4 th. 2009 pasal 88.	Tidak terbatas	Membuka rahasia perusahaan Menimbulkan persaingan tidak sehat.	Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) Menghindari persaingan tidak sehat
		Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	- UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h. - UU Nomor 4 th. 2009 pasal 88.	Tidak terbatas	Terhambatnya proses evaluasi dan pengawasan kegiatan pertambangan	Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) Menghindari persaingan tidak sehat
		Data Teknis potensi air tanah	- UU Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf d - UU Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 37 ayat 5	Tidak terbatas	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan Alam
		Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Koordinat	- UU Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf d. - UU Nomor 4 th. 2009 Pasal 88.	Tidak terbatas	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan Alam

No	SUMBER INFORMASI	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
		Data Teknis hasil kegiatan survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi	- UU Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3) - UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf d.	Tidak terbatas	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan Alam
		Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi	- UU Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3) - UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf d.	Tidak terbatas	- membuka rahasia perusahaan - Menimbulkan persaingan tidak sehat.	Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) Menghindari persaingan tidak sehat
		Pengelolaan Data Minyak dan Gas Bumi	- UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf d. - UU Nomor 11 tahun 2001 tentang Migas pasal 42 huruf b	Tidak terbatas	- membuka rahasia perusahaan - Menimbulkan persaingan tidak sehat.	Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) Menghindari persaingan tidak sehat
		Dokumen perizinan Air Tanah	- UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf d. - UU Nomor 7 tahun 2004 pasal 16 huruf f	Tidak terbatas	- membuka rahasia perusahaan - Menimbulkan persaingan tidak sehat.	Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) Menghindari persaingan tidak sehat
2	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Daftar Pembeli (buyer) yang sudah dimiliki oleh pengusaha (eksportir) tertentu	UU Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Tidak terbatas	Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
		Surat Pengajuan Hak Merek, Cipta, Paten, desain yang masih dalam proses KEMENKUMHAM	UU Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Sampai dengan terbitnya hak merek, cipta, paten, desain	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI
		Data debitur dan bergulir	UU Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 3	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi debitur dari kelangsungan usahanya
		Data Keuangan IKM (Industri Kecil Menengah)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 3	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
		Data Stock Gula Kristal Putih	- UU Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf e angka 3	Tidak Terbatas	Dapat menimbulkan gejolak harga	Menjaga Iklim Usaha Kondusif



No	SUMBER INFORMASI	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
		Surat Keterangan Asal (SKA) barang, Penerbitan SPEK (Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi), Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri	UU Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Tidak Terbatas	Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga Iklim Usaha Kondusif
3	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rencana pelaksanaan tukar menukar /pemindahtanganan	UU Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf e angka 4	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Mengganggu / berpengaruh terhadap penataan siklus Pengelolaan Barang Daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan / siklus PBD
		Database Obyek Pajak dan Retribusi	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database Obyek pajak dan retribusi
4	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PENGELOLA SUMBER DAYA KAWASAN SEGARA ANAKAN	Peta kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan laut	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan j - UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UUD 45 Tahun 2009	Tidak terbatas	Mengakibatkan eksploitasi dan explorasi secara besar-besaran	Dapat melindungi sumber daya lingkungan dan kekayaan alam
		Hasil Uji Laboratorium Untuk Keperluan konsumsi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mempengaruhi mutu produk pemasaran	Kesehatan masyarakat tidak terjamin
		Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai pelaksanaan operasi	Kelestarian sumber daya alam terwujud	Lingkungan rusak
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara	- UU Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1, pasal 79, pasal 84, pasal 85 ayat 1 s/d 3  UU No. 24 Tahun 2013 pasal 79 ayat 3 pasal 84 ayat 1	Tidak terbatas	Terjadi penyalahgunaan data pribadi seseorang	Menjamin dan melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang
6	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Dokumen Penyaluran Kredit Pengembangan Usaha Tani	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan ada pelunasan kredit	Terjadinya penyalahgunaan dokumen dan timbul ketidakpercayaan pihak bank	Lebih memudahkan dalam pembinaan penyelesaian kredit

No	SUMBER INFORMASI	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
		Dokumen Bantuan Pengembangan Usaha	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Penyalahgunaan dokumen bantuan pengembangan usaha	Melindungi Gapoktan dalam mengembangkan usaha
7	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Peta batas kawasan hutan digital.	- UU Nomor 41 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d.	Tidak terbatas	Rusaknya koordinat batas kawasan hutan negara.	Menjaga/melindungi batas kawasan hutan negara.
		Rencana pemanfaatan/ pengelolaan kawasan hutan dan hasil hutan.	- UU Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan.	Tidak terbatas	Mengungkapkan kekayaan alam daerah.	Mengamankan data.
		Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal logging/illegal trading yang masih dalam proses.	- UU Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan.	Sampai dengan proses P21	Mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan.	Proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.
		Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi.	- PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.	Setelah dinyatakan untuk publik	Terjadi eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak.	Terjaganya sumber daya plasma nutfah.
		Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal.	- PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan tanaman pasal 41 (1).	Terbatas sampai selesainya proses pengusutan	Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.	Mengamankan proses penegakan hukum.
		Prose penyelesaian pengusutan peredaran pupuk dan peredaran pestisida.	- UU nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 37 (3), Pasal 38, 39, dan 41, Pasal 60 ayat (1) huruf f dan g. - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17a	Terbatasnya sampai selesainya pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Melindungi dan mengamankan petugas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
		Proses penyelesaian sengketa perusahaan perkebunan besar negara/swasta.	- UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 21, Pasal 47 ayat 1. - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17a. - UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 12.	Terbatas sampai selesainya sengketa	Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.	Mengamankan proses penegakan hukum.

No	SUMBER INFORMASI	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
		Proses usulan penilaian usaha perkebunan negara/swasta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 17 ayat (2), pasal 60 (c,d).</li> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17a.</li> </ul>	Terbatas sampai dengan 6 bulan dari sejak proses pengusulan	Bertentangan dengan proses.	Mengamankan hak pribadi/perusahaan.
8	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Naskah Ujian Nasional dan Ujian Sekolah / Lembaga	UU No. 20 Tahun 2003, Permendikbud tentang UN, Petunjuk Operasional UN dan UNPK	Terbatas, sesuai tahun pelajaran yang berlaku	Dapat mengganggu kepentingan umum	Sebagai perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
		Proses Scanning Lembar Hasil Ujian				
		Proses Perencanaan kegiatan dan anggaran	PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005	Terbatas, sesuai tahun anggaran yang berlaku	Mengganggu pengambilan keputusan yang akan digunakan untuk kepentingan umum	Rahasia Negara terjaga
		Memo atau surat-surat kedinasan antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan	UU Nomor 14 Tahun 2008	Berdasarkan peraturan yang berlaku	Merugikan kepentingan bangsa dan negara	Rahasia Negara terjaga
		Proses Pengelolaan Data Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Sarana Prasarana	UU Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 6 ayat (3)	Berdasarkan peraturan yang berlaku	Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan	Menjaga ketertiban umum
9	DINAS KESEHATAN	Penderita HIV / AIDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesepakatan WHO</li> <li>- Permenko Kesra II / 2009</li> <li>- Perda Nomor 5 Tahun 2009</li> </ul>	Tidak terbatas	Bertentangan dg kesepakatan internasional	Melindungi HAM dan menghindari dari stigma dan diskriminasi
		Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Kesehatan Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 57 ayat 1</li> <li>- UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat 2</li> </ul>	Atas perintah hakim / pengadilan	Membuka rahasia pribadi dan bila tanpa perintah hakim/pengadilan akan menjadi kasus pidana	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
		Laporan kasus / diagnosis penyakit pasien	- UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2-009 Pasal 57 ayat 1	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien

No	SUMBER INFORMASI	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
		Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan.	- UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 44 ayat 3	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi subyek penelitian
		Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis.	- Permenkes Nomor 1419/MENKES/PER/X/20 05 Pasal 18 ayat 1	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
		Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- Kepmenkes Nomor 496/Men kes/SK/IV/2005	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
		Hasil audit terkait dengan medical error.	- Kepmenkes No. 496/Men kes/SK/IV/2005	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
10	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Menggangu proses pelayanan terhadap kelayan)	Mempermudah penanganan permasalahan yang dialami kelayan
		Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks Wfs)	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Menggangu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga menggangu proses rehabilitasi/ penanganan kelayan)	Melindungi hak pribadi kelayan
		Identitas Korban Tindak Kekerasan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Menimbulkan gangguan traumatis kelayan terutama bagi korban tindak kekerasan seksual dan pembunuhan)	Membantu mempercepat proses rehabilitasi sosial kelayan
		Alamat Shelter (Tempat Penampungan)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 2	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi kelayan korban tindak kekerasan

No	SUMBER INFORMASI	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
		Biodata Individu dan data Keluarga : a. Ketenagakerjaan  b. Transmigrasi	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan j	Tidak terbatas	Mengungkap Rahasia Pribadi yang bersifat rahasia	melindungi setiap Warga Negara Indonesia dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
		Usulan Penetapan Upah Minimum Bupati/Walikota kepada Gubernur	- UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j	Sampai Upah Minimum ditetapkan Gubernur	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	menjaga iklim kondusif
		Usulan Pengguguran Pelaksanaan Upah Minimum dari Dunia Usaha kepada Gubernur	- UU Nomor 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j	Sampai terbit surat penangguhan Upah Minimum	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	menjaga iklim kondusif
		Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)	UU Nomor 3 Tahun 1951	Tidak terbatas	Mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia Pengusaha	Melindungi hak pribadi Pengusaha
		Nama dan Alamat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada Perusahaan di Jawa Tengah	- UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan - UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan j	Tidak terbatas	Mengungkap Rahasia Pribadi yang bersifat rahasia	Kepastian perlindungan terhadap TKA
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rencana Penertiban / Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	- Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 - UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai pelaksanaan	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana
		Informasi perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang PPNS di Lingkungan Pemda	Tidak terbatas	Penyidikan akan terpengaruh dengan provokasi	Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku

No	SUMBER INFORMASI	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
		Informasi hasil penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggar Perda Kabupaten Cilacap	PP Nomor 6 Tahun 2010  UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 a (1)	Sampai selesainya kasus	Menggagalkan rencana operasi penertiban	Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi penindakan
		Informasi data pribadi personil penegak Perda	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 buruf a Nomor 4	Tidak terbatas	Membahayakan keselamatan petugas penegak Perda dari ancaman/dendam subyek pelanggar Perda	Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar Perda
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Data Identitas korban tanah longsor yang berada di pengungsian desa Ujungbarang Kec. Majenang	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Sampai relokasi jadi dan dapat ditempati	Mengungkapkan rahasia pribadi korban	Melindungi hak pribadi korban
		Data identitas korban bencana kebakaran yang meninggal dunia	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Sampai saat menerima Bansos	Mengungkapkan rahasia pribadi korban	Melindungi hak pribadi korban
		Data identitas korban tanah longsor yang meninggal dunia di tempat pengungsian sementara	- UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Sampai relokasi terwujud / terealisasi	Mengungkapkan rahasia pribadi korban	Melindungi hak pribadi korban
13	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN	Dokumen sisi mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	- UU Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b, -PP No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten	Tidak Terbatas	Dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu.	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi
		Hasil Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar	- UU Nomor 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf b,  - PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Wajib	Sampai dengan ada keputusan resmi	Dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu.	Melindungi dan Mengamankan hasil informasi yang diperoleh
		Hasil Uji Mutu Produsen Pangan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a  - UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Sampai dengan ada keputusan resmi	Menimbulkan Keresahan di masyarakat	Melindungi ketentraman masyarakat

No	SUMBER INFORMASI	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pangan</li> <li>- UU Nomor 69 Tahun 1999 tentang Iklan dan Pelabelan</li> </ul>			
14	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 Ps 17 huruf a</li> <li>- UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul>	tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
		Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a</li> <li>- UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Pedindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul>	tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
		Dokumen proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum
		Rencana Detail Hasil AMDAL bidang pertahanan keamanan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c	tidak terbatas	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara/daerah	Melindungi ketahanan dan keamanan negara
		Hasil Uji Laboratorium Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I</li> <li>- Permen LH Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan</li> </ul>	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi dan mengamankan pelanggan

No	SUMBER INFORMASI	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Proiritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i (Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi Publik atau Pengadilan. "Memorandum yang dirahasiakan" adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan.</li> <li>- Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 356/264/SJ tanggal 28 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Pelaporan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2013 berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2013. KUA dan PPAS tidak termasuk dalam dokumen yang harus dipublikasikan dalam rangka penungkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan perencanaan pembangunan daerah.</li> </ul>	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja sehingga membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
16	BADAN KESBANGPOL	Kegiatan Intelejen terkait dengan Ideologi, Politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP ( Pasal 17 huruf c )</li> <li>- UU No 3 Tahun 2002</li> </ul>	Tidak terbatas	Menimbulkan keresahan di masyarakat Mengganggu kelancaran penanganan khusus	Menjaga stabilitas daerah dan wilayah



No	SUMBER INFORMASI	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
		Arsip daftar orang yang masuk G 30 S PKI dan Organisasi terlarang Lainnya	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf j - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Mengungkap rahasia pribadi yang bersifat rahasia
		Data Narapidana pada Lembaga Permasyarakatan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan huruf j	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
		Data Narapidana Teroris pada Lembaga Pemasyarakatan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan huruf j	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
17	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Identitas Korban yang dirujuk di Pusat Pelayanan Terpadu BP3AKB Prov. Jateng	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Menggangu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi Hak Pribadi
		Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 2	tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi
		Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) dan program bantuan kepada pemerintah desa/kel dan kelompok masyarakat	UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 2	Sampai adanya petunjuk/rekomendasi Gubernur	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Asas Praduga tak Bersalah)	Melindungi hak privasi
		Proses Penempatan / relokasi / fasilitator PNPM-MP	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Sampai penerbitan keputusan	menimbulkan friksi antar fasilitator dan kolusi	terhindarnya friksi antar fasilitator dan kolusi
		Proses Penentuan juara lomba terkait dengan pemberdayaan masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	berakibat terjadinya friksi antar nominator dan kolusi	terhindarnya friksi antar nominator dan kolusi
		Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah desa / Kel dan kepada kelompok masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan

No	SUMBER INFORMASI	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
18	SEKRETARIAT DPRD	Data Anggota DPRD	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Data pribadi yang bersangkutan terungkap	Rahasia pribadi anggota terlindungi
		Data Rancangan-Rancangan Keputusan DPRD	UU Nomor 14 Tahun 2008	Sampai ditetapkan menjadi Keputusan DPRD	Dapat menimbulkan konflik	Mencegah timbulnya konflik karena adanya pengungkapan secara prematur
		Catatan-catatan, Notulen, Risalah Rapat yang dinyatakan tertutup	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j, Pasal 68 Peraturan Tatib DPRD	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Sifat tertutupnya rapat terjaga
19	BAGIAN PERTANAHAN	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menunjang kelancaran pembangunan
		Berita Acara Panitia B (Panitia Pemeriksa Tanah) Prov. Jateng	- PP Nomor 60 Tahun 1996	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian atas hak atas tanah
		Kajian teknis penetapan lokasi dan basic design pengadaan tanah untuk kepentingan umum	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Tidak terbatas	Menimbulkan spekulasi tanah dan menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menunjang kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah
		Besaran harga hasil penilaian lembaga independen (Appraisal) untuk pengadaan tanah	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Tidak terbatas	Mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.	Adanya kepastian dalam penetapan harga tanah dan menunjang kelancaran pengadaan tanah
		Pertimbangan teknis tukar menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	- UU Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.	Menunjang proses tukar menukar dan pinjam pakai sesuai ketentuan
		Data Sertifikat tanah hak pakai dan HPL, tanah negara, tanah obyek land reform, tanah HGU dan tanah terlantar	- Peraturan Ka BPN RI No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hal pengelolaan	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan peruntukan tidak sesuai sertifikat okupasi secara ilegal oleh warga	Menjamin pengelolaan Hak Pakai dan HPL sesuai dengan peruntukannya

No	SUMBER INFORMASI	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
20	BAGIAN PEREKONOMIAN	RKAP BUMD berjalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 5 Th. 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 22</li> <li>- UU Nomor 40 Tahun 2007 ttg Perseroan Terbatas Pasal 63 s.d 65</li> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 KIP Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Terbatas, sampai dengan adanya laporan publikasi pada tahun berikutnya	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur; persaingan usaha bagi BUMD (bisnis plan)	Kinerja bisa terpantau dan terukur; pencapaian bisnis plan secara optimal
		Hasil RUPS BUMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 5 Th, 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 18</li> <li>- UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 75 s.d 91</li> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 KIP Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan	Kinerja bisa terpantau dan terukur; pencapaian bisnis plan secara optimal
		BUMD Bidang Keuangan (Bank Jateng dan BPR BKK) : Data nasabah penyimpan dan simpanannya; laporan pemeriksaan bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 th. 1998 Pasal 33, 40</li> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e</li> </ul>	Tidak terbatas, kecuali mendapat ijin sbgmn ps.41, 41A, 42, 43, 44 dan 44 UU tsb	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab	Aspek dan norma kerahasiaan bank
21	BAGIAN UMUM	Data spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi
		Perangkat khusus persandian	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi
		Kunci sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi Berita / Jalur Komunikasi
		Data Penempatan Jaringan, Peralatan Sandi dan Tempat Kegiatan Sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi
		Data Jalur Komunikasi VVIP	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi
		Data Frekuensi Radio	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi
		Berita/Radiogram	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi

No	SUMBER INFORMASI	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info Dibuka	Manfaat Jika Info Ditutup
1	2	3	4	5	6	7
		Data Lokasi Server Surat Menyurat	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	Tidak terbatas	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat dan data
		Data Frekuensi Komunikasi Mikrotek	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi jalur komunikasi

**BUPATI CILACAP**

**ttd**

**TATTO SUWARTO PAMUJI**